

DINAMIKA NILAI GOTONG ROYONG DALAM PRANATA SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN: STUDI KASUS MASYARAKAT BULUTUI DAN PULAU NAIN, SULAWESI UTARA

THE DYNAMICS OF GOTONG ROYONG VALUES IN THE SOCIAL INSTITUTION OF FISHERMEN SOCIETIES: A CASE STUDY OF BULUTUI'S AND NAIN ISLAND'S SOCIETY IN NORTH SULAWESI

Dede Wardiat

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI
dewadetaris@yahoo.com

Abstract

In fishing communities located in the former transit point (Daseng), the value of mutual cooperation (gotong royong) is closely related to their fishing tools. They can be considered as communal cultural products that reflects users' cooperation, solidarity and attitudes. Nevertheless, the use of fishing tool individually leads to individualism. Consequently, this influences their social life; making the increase of individualism and the decrease of their solidarity and mutual cooperation. Along with the changes of the use of fishing tool, from individuality to communality, the value of gotong royong is introduced. However, this value is only internalized in their division of labor. Whereas in their daily life, they establish a new social institution to facilitate their gotong royong activities. In this condition, the introduction of cooperation that requires a strong social cohesion can be premature because this social institution tend to be manipulated as an instrument by local elites to exploit the society. In this context, new social institutions based on social conditions are needed and the orientation towards the local needs should be the starting point for the institutional development.

Keywords: *fishing gear, mutual cooperation (gotong royong), social institution.*

Abstrak

Dalam lingkungan masyarakat nelayan yang berada di bekas tempat persinggahan (*Daseng*), nilai gotong royong terkait erat dengan alat tangkap yang digunakan. Alat tangkap merupakan produk budaya dari komunitas yang merefleksikan pola kerja sama, solidaritas, serta sikap hidup dari penggunaannya. Penggunaan alat tangkap yang bersifat individual menyebabkan sikap individualisme penduduk relatif tinggi, sehingga berimbas pada kehidupan sosial mereka, termasuk solidaritas dan sikap gotong royong yang cenderung rendah. Seiring dengan perubahan alat tangkap yang digunakan, dari individual ke komunal, nilai gotong royong mulai diperkenalkan. Namun, hal itu hanya terinternalisasi dalam pembagian kerja di antara mereka. Dalam kehidupan sosial, mereka membentuk pranata sosial baru guna mewadahi kegiatan gotong royong di antara warga masyarakat. Di tengah kondisi sosial seperti itu, pengenalan koperasi yang mensyaratkan kohesi sosial yang kuat bisa jadi terlalu prematur karena keberadaan pranata sosial tersebut cenderung dijadikan instrumen oleh elit lokal untuk mengeksploitasi mereka. Dengan kondisi seperti ini, tampaknya diperlukan format pranata sosial baru yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Dalam konteks ini, orientasi terhadap kebutuhan masyarakat setempat harus menjadi titik awal pembangunan kelembagaan di lingkungan mereka.

Kata kunci: alat tangkap, gotong royong, pranata sosial.

Pengantar

Nilai gotong royong merefleksikan solidaritas dan kohesi sosial suatu komunitas. Dalam tatanan praktis, kegiatan gotong royong merupakan prakondisi terbentuknya pranata sosial. Dalam konteks penguatan kelembagaan

sosial, nilai gotong royong merupakan fondasi yang harus melandasi berbagai aktivitas yang akan dilaksanakan suatu komunitas.

Dinamika nilai gotong royong di kalangan masyarakat Bulutui dan masyarakat Pulau Nain menarik untuk diamati, sebab kedua

wilayah tersebut pada awalnya merupakan tempat persinggahan Suku Bajau atau disebut sebagai "Daseng". Meskipun Suku Bajau merupakan suku yang pertama kali menempati Bulutui dan Pulau Nain, dalam perkembangan selanjutnya nelayan dari suku Bugis, Buton, Gorontalo dan Sangir berdatangan dan kemudian menetap di daerah tersebut. Di tengah pluralisme etnis seperti ini, apakah terbentuk nilai gotong royong dalam kehidupan sosial mereka? Dalam konteks ini, pendalaman terhadap nilai gotong royong menjadi sangat penting, terlebih dalam perkembangan kemudian kedua wilayah itu menjadi wilayah penghasil ikan di Sulawesi Utara. Analisis dalam tulisan ini berusaha mengungkap apakah nilai gotong royong yang ada dalam masyarakat yang diteliti merupakan sebuah sistem ideal atau sebagai sistem tindak yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih luas dari itu, analisis dalam tulisan ini juga akan melihat apakah kegiatan gotong royong menjadi prakondisi terbentuknya pranata sosial dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Jika hal itu terjadi, proses pembentukannya dapat direplikasi sebagai elemen model dalam penguatan pranata sosial masyarakat nelayan.

Pembahasan tentang pranata sosial akan difokuskan pada berbagai pranata sosial yang terbentuk dalam menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat setempat serta fungsi dan peran sosial apa yang kemudian dimainkan oleh pranata tersebut di tengah dinamika kemasyarakatan yang terjadi. Dalam tatanan praktis, tulisan ini juga akan melihat peranan pranata sosial-ekonomi yang ada dan pernah ada di lingkungan masyarakat setempat. Meskipun pembahasan tentang hal ini lebih banyak bersifat teknis, berbagai pengalaman empiris yang dialaminya dapat dijadikan *role model* dalam penguatan pranata sosial di kalangan masyarakat nelayan.

Tinjauan Teori Kelembagaan/Pranata Sosial

Secara terminologi, belum ada kesepakatan di antara para ahli tentang pengertian kelembagaan. Dalam banyak literatur teori, istilah "kelembagaan" (*social institution*) selalu disilangkan dengan "organisasi" (*social organization*). Kedua kata ini sering sekali menimbulkan perdebatan di antara para ahli. "What constitutes an 'institution' is a subject of continuing debate among social scientist..... The term institution and organization are commonly

used interchangeably and this contributes to ambiguity and confusion" (Norman Uphoff, 1986). Belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan sarjana sosiologi untuk menerjemahkan istilah bahasa Inggris 'social institution'; ada yang menerjemahkannya dengan istilah 'pranata', ada pula yang 'bangunan sosial'" (Soemardjan & Soemardi, 1964).

Dalam literatur-literatur sosiologi klasik, pembahasan tentang *social institution* cenderung berbaur dengan pembahasan tentang *social organization*. Dalam buku *Le Suicide* yang ditulis oleh Emile Durkheim pada tahun 1897, masalah nilai dan norma merupakan aspek yang dikaji dalam organisasi sosial. Demikian juga Cooley dalam buku *Social Organization* yang terbit tahun 1909. Dia memasukkan objek mental dalam pembahasannya tentang grup primer. Baru pada tahun 1950-an, terjadi perubahan yang mendasar, ketika istilah *institution* semakin terfokus kepada aspek-aspek nilai, norma dan perilaku; sedangkan *organization* terfokus kepada struktur.

Meskipun secara terminologis belum ada kesepakatan di antara para ahli tentang pengertian kelembagaan, bahkan istilah "kelembagaan" (*social institution*) selalu disilangkan dengan "organisasi" (*social organization*) sebagaimana dideskripsikan di atas, menurut alur pikir Syahyuti (2003: 35), istilah kelembagaan memberi tekanan kepada lima hal. *Pertama*, kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen. Ia menjadi permanen karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan. Cooley (dalam Soemardjan & Soemardi, 1964: 75) secara sederhana menyimpulkan bahwa: "...institution defined as established norm or procedures. It is sometime the practice to refer to anything which is socially established as an institution". Suatu norma dan tata cara yang bersifat tetap tersebut berada dalam suatu kelembagaan. Sejalan dengan itu, Uphoff juga menyatakan bahwa kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang telah berjalan lama. Uphoff tidak menyebut sesuatu yang bersifat tetap tersebut sebagai *norm* dan *procedures*, tetapi *norm* dan *behaviour*. "In general, institutions, are complexes of norm and behaviour that persist over time by serving collectively valued purpose" (Uphoff, 1986: 9).

Meskipun dalam batasan Uphoff 'norma' dan 'perilaku' merupakan dua hal pokok

dan berada dalam satu kalimat, tetapi keduanya bukanlah sesuatu yang selevel atau bukan dua hal yang dapat dipisahkan saja dengan mudah begitu saja. Menurut struktur peristilahan, 'perilaku' diturunkan dari 'norma', sehingga norma berada di level yang lebih tinggi. Dalam batasan Johnson (1960:48), perilaku selain dipengaruhi oleh apa yang disebutnya dengan 'culture', "... also chemical, physical, genetic, and physiological". Sesuatu yang tetap tersebut berguna untuk menyediakan stabilitas dan konsistensi di masyarakat, yang berfungsi sebagai pengontrol dan pengatur perilaku. Selain itu, aspek yang tetap tersebut menjamin situasi akan berulang atau dapat diperkirakan (*predictable*), sehingga perilaku tersebut menjadi efektif. Perilaku yang teratur dan *predictable* merupakan hal yang penting dalam masyarakat sehingga menjadi teratur, bukan perilaku yang spontan dan *unpredictable*.

Kedua, berkaitan dengan hal-hal abstrak yang menentukan perilaku. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu kompleks beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak selevel. Hal yang abstrak ini kira-kira sama dengan apa yang disebut Cooley dengan *public mind*, atau 'wujud ideal kebudayaan' oleh Koentjaraningrat, atau *cultural* menurut Johnson. Secara garis besar, hal yang dimaksud tersebut terdiri dari nilai, norma, hukum, peraturan-peraturan, pengetahuan, ide-ide, *belief*, dan moral.

Kumpulan dari hal-hal abstrak tersebut, terutama norma sosial, diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat (Taneko, 1993). Fungsi-fungsi yang dimaksud merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Karena tingkat kepentingannya yang tinggi, maka seiring berjalannya waktu, akhirnya ia mempunyai kedudukan pasti, atau terkristalisasi menjadi semakin tegas. Sebagaimana juga ditambahkan W. Hamilton (dalam Johnson, 1960: 22) "*Social institution a complex normative pattern that is widely accepted as binding in particular society or part of a society*".

Bahwa kelembagaan lebih fokus kepada aspek kultural, juga merupakan kerangka berpikir Gillin dan Gillin. Ia mendefinisikan kelembagaan dalam *cultural concept* sebagai "*A social institution is a functional configuration of cultural patterns (including actions, ideas, attitudes, and cultural equipment) which*

possesses a certain permanence and which is intended to satisfy felt social need" (dalam Soemardjan & Soemardi, 1964: 67).

Ketiga, berkaitan dengan perilaku, atau seperangkat *mores* (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup. Menurut Hebding, *et al.* (1994), institusi sosial merupakan sesuatu yang selalu ada pada semua masyarakat, karena berguna untuk mempertemukan berbagai kebutuhan dan tujuan sosial yang dinilai penting. Jika masyarakat ingin *survive*, harus ada insitusi sosial. Keluarga misalnya, merupakan insitusi sosial pokok yang mempertemukan kebutuhan sosial yang dinilai vital.

Koentjaraningrat juga termasuk salah satu penulis yang lebih menekankan kepada aspek perilaku. Ia menggunakan kata 'pranata' sebagai padanan kata '*institution*', dan 'pranata sosial' untuk '*social institution*'. Pranata diartikannya sebagai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya. Sementara itu, pranata sosial diartikan sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1964: 113). Jelas terlihat bahwa definisi ini lebih menekankan kepada aspek tata kelakuan yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Meskipun aspek 'perilaku' merupakan inti dari kajian pranata, Koentjaraningrat menyatakan bahwa terwujudnya suatu pranata berada dalam pengaruh dari tiga wujud kebudayaan, yaitu: (1) sistem norma dan tata kelakuan dalam konteks wujud ideal kebudayaan, (2) kelakuan berpola untuk wujud kelakuan kebudayaan, dan (3) peralatannya untuk wujud fisik kebudayaan. Ditambah dengan personelnya sendiri, pranata terdiri dari empat komponen tersebut yang saling berinteraksi satu sama lain.

Keempat, kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi. Untuk penjelasan ini dinyatakan oleh E. Chinoy bahwa "*An institution is an organization of conceptual and behaviour pattern in manifested through social activity and its material products. Thus it may be regarded as a 'cluster of social usages' and as composed of custom, folkways, mores, and trait complexes organized, consciously or unconsciously, into a*

functioning unit” (dalam Soemardjan & Soemardi, 1964: 68).

Kelima, kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah. Tekanannya adalah pada kemampuannya untuk memecahkan masalah. Hebding, *et al.* (1994: 407) menyatakan bahwa institusi sosial adalah nilai-nilai yang melekat pada masyarakat yang menyediakan stabilitas dan konsistensi di masyarakat, yang berfungsi sebagai pengontrol dan pengatur perilaku, menjamin situasi akan berulang, sehingga menjadi efektif. Efektivitas merupakan perhatian utama dalam apa yang dikenal dengan pemahaman “ekonomi kelembagaan”.

Dari kelima tekanan pengertian di atas, terlihat bahwa ‘kelembagaan’ memiliki perhatian utama kepada perilaku yang berpola yang sebagian besar datang dari norma-norma yang dianut. Kelembagaan berpusat pada sekitar tujuan-tujuan, nilai, atau kebutuhan sosial utama. Lebih jauh, kelembagaan mengacu kepada suatu prosedur, suatu kepastian, dan panduan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, aktivitas manusia atau komunitas merupakan titik sentral kelembagaan. Menurut Koentjaraningrat (1987: 70), aktivitas manusia atau aktivitas kemasyarakatan untuk menjadi lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain:

- (1) Suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis,
- (2) Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut,
- (3) Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu, yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan.
- (4) Mempunyai perlengkapan dan peralatan, dan
- (5) Sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama.

Terlepas dari prasyarat dan karakteristik yang ada, disadari ataupun tidak, lembaga sosial memiliki fungsi dalam kehidupan sosial suatu komunitas. Menurut Soerjono Soekanto (1999: 34), lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut.

- (1) Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus

bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan.

- (2) Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

Sementara itu, Horton dan Hunt lebih menekankan pada pengakuan warga masyarakat akan keberadaan lembaga sosial, atas dasar itu kemudian membagi fungsi lembaga sosial dalam dua katagori, yakni:

- (1) Fungsi Manifes atau fungsi nyata, yaitu fungsi lembaga yang disadari dan diakui oleh seluruh masyarakat.
- (2) Fungsi Laten atau fungsi terselubung, yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika diikuti dianggap sebagai hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan.

Jika melihat uraian fungsi lembaga sosial dari kedua ahli tersebut, tampaknya perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada sudut pandang yang berbeda. Soerjono Soekanto lebih melihat lembaga sosial sebagai instrumen masyarakat dalam kehidupan sosialnya, sedangkan Horton dan Hunt lebih menekankan pada pengakuan komunitas terhadap keberadaan lembaga sosial yang ada. Terlepas dari perbedaan sudut pandang yang ada, lembaga sosial, baik dalam fungsinya yang manifes maupun yang laten, tetap memegang peranan penting dalam kehidupan sosial suatu masyarakat, bukan saja sebagai instrumen dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang, tetapi juga menjadi perekat untuk menjaga keutuhan serta alat vital dalam sistem pengendalian sosial.

Gotong Royong dalam Dinamika Masyarakat Nelayan

Kegiatan Gotong Royong merefleksikan solidaritas dan kohesi sosial suatu komunitas. Dilihat dalam prespektif yang lebih luas, tampaknya kerja sama dan solidaritas dalam komunitas sangat erat kaitannya dengan alat tangkap yang digunakan, sebab alat tangkap yang digunakan nelayan merupakan produk budaya dari komunitas penggunanya. Dia

merefleksikan pola kerja sama, solidaritas, serta sikap hidup dari penggunanya. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut, baik di Bulutui maupun di Pulau Nain, ada beberapa jenis alat tangkap, terutama pukot yang kemudian digunakan oleh para nelayan, sebagian nelayan masih tetap memilih untuk menggunakan alat tangkap tradisional yang diwariskan oleh nenek moyangnya, seperti pancing dan cubi (tombak/panah).

Di Bulutui, salah seorang yang sampai saat ini masih menggunakan alat tangkap berupa pancing menyatakan bahwa bagi dirinya lebih nyaman menggunakan alat tangkap berupa pancing, karena menurut pendapatnya bekerja sama dengan orang lain dalam menangkap ikan banyak menimbulkan perselisihan, terlebih-lebih jika banyak yang mengatur. Ketika diajukan pilihan antara melaut sendirian dengan berkelompok, narasumber tersebut menjawab dalam bahasa setempat bawa: “*Dari pada lebih dari tiga orang mo berkelahi, lebih baik sa sandiri*”. Pernyataan ini mengindikasikan kemandirian serta sikap individualisme yang tinggi.

Menanggapi hal ini, salah seorang tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak adanya kerja sama dalam mencari nafkah sebagai akibat penggunaan alat tangkap yang individual menyebabkan sikap individualisme penduduk Bulutui relatif tinggi. Keadaan ini berimbas pada kehidupan kemasyarakatan, solidaritas, serta sikap gotong royong di kalangan masyarakat relatif rendah. Karena kondisi ini, pada tahun 1970-an beberapa tokoh masyarakat setempat membentuk kelembagaan sosial yang disebut “*Kerukunan Warga*” dan “*Persatuan*”. Kedua kelembagaan sosial tersebut dibakukan dalam organisasi formal dengan cara disusun kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Menurut salah seorang pendirinya, kelembagaan sosial tersebut sengaja dibakukan dalam organisasi formal agar pertanggungjawabannya lebih jelas sehingga menumbuhkan kepercayaan warga guna mengembangkan sikap gotong royong. Dengan demikian, nilai gotong royong di lingkungan masyarakat Bulutui merupakan nilai yang dikenalkan oleh para tokoh masyarakat setempat. Dalam perkembangan lebih lanjut nilai gotong royong ini terus berkembang, tetapi intensitasnya relatif rendah.

Sebagaimana halnya masyarakat Bulutui, dahulu masyarakat Pulau Nain juga menggunakan

alat tangkap yang bersifat individual, seperti pancing dan cubi. Sebagaimana telah disinggung di atas, tidak adanya kerja sama dalam mencari nafkah sebagai akibat penggunaan alat tangkap yang individual menyebabkan sikap individualisme penduduk Pulau Nain relatif tinggi. Keadaan ini berimbas pada kehidupan kemasyarakatan, solidaritas, serta sikap gotong royong di kalangan masyarakat yang relatif rendah. Namun demikian, kehidupan bersama yang relatif lama dalam suatu komunitas yang terikat dalam kesatuan wilayah geografis menyebabkan tumbuhnya kerja sama dan solidaritas di antara mereka.

Menurut salah seorang narasumber, meskipun Hukum Tuanya (kepala desa) diangkat sendiri oleh masyarakat, sejak tahun 1830 Pulau Nain telah menjadi desa tersendiri. Selain telah lama menjadi satu kesatuan wilayah administratif, penggunaan bahasa Bajau sebagai bahasa sehari-hari seluruh masyarakat menjadi ikatan kuat yang memberikan identitas kultural mereka sebagai suku Bajau. Adanya rasa *in group* dalam kesatuan etnis menjadi pendorong tumbuhnya kerja sama dan solidaritas di kalangan masyarakat Pulau Nain. Oleh karena itu, meskipun masih relatif banyak yang menggunakan alat tangkap tradisional, kegiatan gotong royong untuk kepentingan bersama seperti memperbaiki fasilitas umum, baik jalan maupun tempat ibadah, kadang-kadang dilakukan oleh masyarakat.

Secara pragmatis, saat ini tampaknya kegiatan gotong royong dipahami oleh mayoritas masyarakat sebagai bentuk kerja sama dalam melaut, khususnya dalam penggunaan Jaring Chang Besar. Pukat Chang melibatkan banyak orang. Satu buah Pukat Chang melibatkan minimal 18 hingga 20 orang anak buah kapal (*masanai*), sembilan orang penyelam dan dua hingga empat orang teknisi yang bertugas menjaga kompresor untuk para penyelam. Penggunaan Pukat Chang memerlukan kerja sama seluruh nelayan yang terlibat sebagai sebuah tim yang utuh. Para penyelam yang bertugas menggiring ikan agar masuk ke dalam jaring bekerja sama dengan teknisi yang bertugas menjaga kompresor untuk para penyelam. Setelah ikan masuk, diperlukan kerja sama para *masanai* dalam mengangkat jaring ke dalam perahu. Kerja sama kelompok dalam penggunaan Pukat Chang sangat menentukan, baik sesama *masanai*, antara *masanai* dengan penyelam, atau antara penyelam dengan teknisi. Kendali dari keseluruhan kerja sama tersebut berada di bawah

Pimpinan (Tonaas). Oleh karena itu, seorang Tonaas bertindak sebagai patron, baik dalam pelaksanaan kerja maupun di luar kerja. Dilihat dalam perspektif yang lebih luas, di tengah-tengah masyarakat yang terbiasa dengan pola kerja individual, pola kerja sama dalam kelompok seperti yang diterapkan dalam penggunaan Pukat Chang merupakan cara kerja baru dalam tatanan masyarakat setempat.

Di luar kegiatan melaut, di lingkungan masyarakat Bulutui kegiatan gotong royong dalam membangun rumah relatif masih kuat. Menurut salah seorang Tetua Kampung, jika ada salah seorang warga membangun rumah biasanya warga lainnya menyumbangkan tenaga secara gotong royong. Dahulu selain menyumbang tenaga banyak juga warga yang terlibat dalam "Mapalus Pembangunan Rumah". Bagi warga yang menjadi anggota mapalus pembangunan rumah, selain menyumbang tenaga juga biasanya mereka menyumbangkan bahan bangunan, seperti Semen, Bata, dan Seng. Warga yang menyumbang tersebut akan mendapat balasan sesuai dengan jenis barang yang disumbangkan ketika ia membangun rumah. Dalam istilah setempat, sumbangan dalam mapalus pembangunan rumah tersebut bersifat baki balas, baik barang yang disumbangkan maupun tenaga kerja. Dalam perkembangan saat ini di Bulutui sudah hampir tidak ada kelompok mapalus pembangunan rumah, namun kegiatan gotong royong dalam menyumbangkan tenaga masih tetap dilakukan di kalangan masyarakat.

Sebaliknya, di Pulau Nain, saat ini kegiatan gotong royong dalam membangun rumah sudah sangat jarang dilakukan. Menurut salah seorang Tetua Kampung, dahulu setiap warga yang membangun rumah selalu mendapat bantuan tenaga secara gotong royong dari warga lainnya. Bahkan, di kalangan masyarakat banyak muncul kelompok mapalus pembangunan rumah seperti di daerah-daerah Sulawesi pada umumnya. Namun, sejak masyarakat Pulau Nain mendapat penghasilan yang besar dari budidaya rumput laut pada tahun 1996 hingga tahun 1999, kegiatan gotong royong dalam membangun rumah menghilang. Pada masa itu hampir setiap warga masyarakat membangun rumahnya masing-masing, sehingga rumah panggung dari kayu di Pulau Nain berganti menjadi rumah permanen. Warga masyarakat yang membangun rumah biasanya membeli bahan bangunannya sendiri. Sementara itu, tenaga kerja diupahkan kepada tukang bangunan beserta para kulinya.

Dengan demikian, perubahan penghasilan yang terjadi secara drastis tampaknya menggeser kegiatan gotong royong dalam pembangunan rumah di Pulau Nain.

Sementara itu, kegiatan gotong royong untuk membantu tetangga dalam hajatan tampaknya terjadi di Bulutui dan Pulau Nain. Di Bulutui kegiatan gotong royong untuk membantu tetangga dalam hajatan dibakukan dalam bentuk kelembagaan sosial yang bersifat formal yang disebut "Persatuan". Menurut salah seorang tokoh masyarakat setempat, kelembagaan sosial tersebut dibentuk oleh para tokoh masyarakat setempat pada tahun 1970 dengan tujuan untuk menumbuhkan solidaritas dan sikap gotong royong di kalangan masyarakat yang saat itu dinilai relatif rendah. Secara spesifik, kelembagaan sosial ini diarahkan untuk membantu secara gotong royong anggota masyarakat yang akan mengadakan acara pernikahan. Secara umum, mekanisme bantuan dalam persatuan ini pada dasarnya merupakan arisan dalam bentuk barang (*natura*). Seseorang yang menyumbang barang tertentu pada salah seorang warga yang akan menikah, maka nanti pada saat orang tersebut menikah akan mendapat sumbangan barang yang sama. Menurut salah seorang responden, saat ini di lingkungan Dusun Bulutui terdapat tiga kelompok persatuan, yakni Persatuan Pemuda, Persatuan Muda-Mudi, dan Persatuan Daging.

Persatuan Pemuda beranggotakan remaja laki-laki, paling muda biasanya para pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jika ada anggota masyarakat yang mau menikah, para anggota persatuan pemuda ini biasanya mereka menyumbang bahan-bahan mentah, seperti beras, gula, mentega, dan minyak. Mereka yang menyumbang akan mendapat imbalan kelak pada saat mereka hendak menikah.

Persatuan muda-mudi beranggotakan remaja putra dan putri. Kelompok ini memiliki anggota relatif banyak, saat ini mencapai sekitar 50 hingga 60 orang. Sumbangan yang diberikan oleh kelompok ini biasanya berupa kue yang disesuaikan dengan permintaan pihak yang akan menikah. Kue tersebut dibuat oleh para anggota persatuan secara bergotong royong. Seperti halnya pada persatuan pemuda, imbalan yang akan diterima para anggota persatuan muda-mudi ini juga akan diterima kelak pada saat mereka menikah.

Berbeda dengan persatuan pemuda serta persatuan muda-mudi, persatuan daging beranggotakan ibu-ibu. Menurut salah seorang narasumber, persatuan daging di Dusun Bulutui saat ini beranggotakan sekitar 30 orang. Sumbangan yang diberikan antara sesama anggota persatuan ini berupa daging sapi. Jumlah sumbangan daging sapi tersebut dihitung dalam satuan kilo. Mereka yang menyumbang akan mendapat balasan kelak pada saat orang yang bersangkutan akan mengadakan acara pernikahan anaknya. Terlepas dari jenis kelompok serta jenis sumbangan yang diberikan, bantuan dalam pola gotong royong yang dikembangkan selalu memiliki imbal balik dengan nilai yang setara. Menurut salah seorang tokoh masyarakat setempat, bantuan dalam pola gotong royong di kalangan masyarakat Bulutui selalu “Baku Balas” dengan nilai yang setimpal.

Kelompok sosial dengan nama persatuan ini tidak hanya ada di Bulutui, tetapi juga ada di Pulau Nain dengan peran dan fungsi sosial yang sama. Menurut salah seorang tokoh masyarakat setempat, persatuan di Pulau Nain mulai muncul sekitar tahun 1980-an, sebab dalam menyelenggarakan hajatan, terutama acara pernikahan, memerlukan biaya yang besar sehingga memerlukan bantuan warga lain secara bergotong royong. Dalam perkembangan lebih lanjut, lembaga sosial dengan persatuan ini terus berkembang. Materi yang disumbangkan secara bergotong royong selain uang juga terus berkembang, seperti minuman, kebutuhan pokok, bahkan muncul persatuan dalam menanggung biaya untuk menebus buku nikah.

Menurut salah seorang responden yang menjadi Ketua Persatuan, persatuan yang mengumpulkan uang tunai terdiri dari tiga kelompok. Kelompok pertama mengumpulkan sumbangan uang dengan jumlah Rp.10.000,- setiap orang dengan anggota sebanyak 91 orang. Kelompok kedua mengumpulkan sumbangan uang dengan jumlah Rp.50.000,- setiap orang dengan anggota sebanyak 98 orang. Kelompok ketiga mengumpulkan sumbangan uang dengan jumlah Rp.100.000,- setiap orang dengan anggota sebanyak 28 orang terdiri dari ibu-ibu.

Persatuan yang mengumpulkan sumbangan dalam bentuk minuman atau kue memiliki anggota sebanyak 53 orang dengan jumlah sumbangan setiap orang sebesar Rp.50.000,-. Persatuan yang mengumpulkan sumbangan dalam bentuk kebutuhan pokok,

seperti beras, gula dan terigu memiliki anggota sebanyak 19 orang. Sumbangan yang diberikan dalam kelompok ini biasanya berbentuk barang, seperti beras atau terigu satu karung per orang atau gula sebanyak 15 kg per orang. Selain sumbangan dalam bentuk barang dan uang, muncul juga persatuan dalam menanggung biaya untuk menebus buku nikah dengan anggota sebanyak 91 orang dengan sumbangan setiap anggota sebesar Rp.10.000,- per orang. Terlepas dari jenis bantuan yang diberikan, menurut beberapa orang responden, adanya persatuan ini sangat membantu masyarakat dalam meringankan biaya yang harus dikeluarkan pada saat menyelenggarakan hajatan, terutama pernikahan anak. Sumbangan yang diberikan dalam persatuan dipandang sebagai tabungan dengan harapan mendapat imbal balik dengan nilai yang setara di kemudian hari.

Di Bulutui, kegiatan gotong royong untuk membantu tetangga dalam kedukaan dibakukan dalam bentuk kelembagaan sosial yang bersifat formal yang disebut “Kerukunan Warga”. Seperti halnya persatuan, kerukunan warga dibentuk oleh para tokoh masyarakat setempat pada tahun 1970 dengan tujuan untuk menumbuhkan solidaritas dan sikap gotong royong di kalangan masyarakat yang saat itu dinilai relatif rendah. Secara spesifik, kerukunan warga merupakan kelembagaan sosial yang dibentuk guna mendorong kegotongroyongan masyarakat dalam membantu warganya yang meninggal dunia. Dalam kelembagaan sosial ini para pengurus memungut iuran dari setiap kepala keluarga sebesar Rp.5.000,-. Hasil iuran tersebut digunakan untuk membeli kain kafan dan biaya penguburan, sehingga tidak membebani pihak keluarga yang sedang berduka. Menurut beberapa orang narasumber, bantuan dari kerukunan warga sangat membantu pihak keluarga yang meninggal, terlebih-lebih bantuan tersebut datang di tengah-tengah anggota masyarakat yang memiliki penghasilan yang tidak menetap, namun bantuan tersebut masih sangat terbatas.

Kerukunan Warga itu tidak hanya ada di Bulutui, tetapi juga ada di Pulau Nain dengan peran dan fungsi sosial yang sama. Menurut salah seorang tokoh masyarakat setempat, kerukunan warga di Pulau Nain dibentuk sekitar tahun 1985 dengan iuran warga pada waktu itu hanya sebesar Rp.1.000,- setiap orang. Sekarang iuran warga sudah naik menjadi Rp.5.000,- setiap orang. Meskipun secara nominal jumlah

sumbangan yang diterima masih relatif kecil, hal itu sangat membantu keluarga yang meninggal. Di lingkungan masyarakat Siau yang beragama Kristen, kegiatan gotong royong untuk membantu tetangga dalam kedukaan dilembagakan dalam lembaga sosial yang diberi nama "Persatuan Duka".

Menurut salah seorang tokoh masyarakat setempat, persatuan duka ini baru dibentuk dua tahun terakhir ini. Keberadaan lembaga tersebut ada pada setiap kolom dengan anggota berkisar antara 25 hingga 30 kepala keluarga. Di tiga Jaga yang masyarakatnya beragama Kristen ada sebanyak 5 kolom. Dengan demikian, secara keseluruhan ada sekitar 5 persatuan duka. Anggota persatuan duka dibagi menjadi anggota Kaum Bapa dan Kaum Ibu. Setiap anggota dikenakan sumbangan sebanyak Rp.2.000,- dalam setiap kali pertemuan di kolom. Keseluruhan sumbangan tersebut diserahkan kepada keluarga anggota kolom yang meninggal. Dilihat dari sisi keberadaannya, Persatuan Duka tampaknya berbeda dengan Kerukunan Warga. Kerukunan Warga berada di tengah masyarakat umum, sedangkan keberadaan Persatuan Duka disatukan dengan kelompok ibadat dalam satuan kolom. Telepas dari perbedaan tersebut, kedua kelembagaan sosial itu sama-sama berperan dalam mengkoordinasi kegiatan gotong royong warga masyarakat dalam membantu warga lainnya yang dalam kedukaan.

Jenis kegiatan gotong royong lainnya yang relatif menonjol, baik di lingkungan masyarakat Bulutui maupun masyarakat di Pulau Nain, adalah membangun atau memelihara fasilitas umum. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa kegiatan gotong royong dalam memelihara fasilitas umum sebagian besar ditujukan untuk tempat ibadah, seperti Gereja di Kampung Kristen (Siau) dan Masjid di Kampung Bajau yang ada di Pulau Nain. Menurut salah seorang tokoh masyarakat di kampung Siau, selama ini pemeliharaan Gereja dilakukan oleh para jemaatnya secara gotong royong. Lebih jauh, responden tersebut menyatakan bahwa perintah dari Gereja melalui Pendeta dalam mengajak masyarakat untuk bergotong royong jauh lebih dipatuhi daripada Perangkat Desa atau Kepala Jaga, sehingga kegiatan gotong royong yang diadakan oleh Gereja selalu melibatkan banyak warga masyarakat. Hal yang sama juga terjadi di Kampung Bajau yang beragama Islam. Kegiatan gotong royong untuk membangun dan merawat

Masjid selalu diikuti oleh sebagian besar warga masyarakat.

Menurut salah seorang responden, pada saat membangun Masjid, setiap kepala keluarga sepakat ditargetkan menyumbang sebanyak Rp.120.000,- dicicil selama tiga bulan. Setelah target sumbangan tersebut terpenuhi, setiap kepala keluarga diperbolehkan untuk menyumbang kembali, bahkan jika namanya dipanggil melalui pengeras suara yang ada di Masjid, orang yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan sumbangan lagi. Selain orang tua, para pemuda juga terlibat aktif mengumpulkan sumbangan untuk pembangunan Masjid. Mereka mengadakan festival menyanyi dan menari secara berkelompok. Pemenangnya dinilai dari jumlah sumbangan yang dapat dikumpulkan, baik sebelum mereka naik ke panggung maupun pada saat pementasan. Relatif menonjolnya kegiatan gotong royong yang ditujukan untuk tempat ibadah mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut tidak semata-mata dilandasi ikatan kepentingan bersama, melainkan lebih didasari oleh norma keagamaan.

Dalam pemenuhan pangan masyarakat, khususnya ikan, baik masyarakat di Bulutui, maupun masyarakat di Pulau Nain tidak pernah melakukan kegiatan secara bergotong royong untuk membantu tetangganya yang kekurangan pangan (ikan). Hal ini tampaknya berkaitan dengan jenis alat tangkap yang mereka gunakan. Sebagaimana telah disinggung di atas, alat tangkap yang digunakan masyarakat di Bulutui maupun di Pulau Nain pada masa lalu berupa pancing, tombak, panah ataupun pukut nyare. Alat tangkap tersebut merupakan alat tangkap yang bersifat individual, bukan alat tangkap yang bersifat komunal. Oleh karena itu, seluruh alat tangkap tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat, hampir seluruh penduduk memiliki minimal salah satu alat tangkap tersebut, sehingga setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan akan ikan bagi keluarganya. Dengan kondisi seperti ini, pada saat itu tidak ada tradisi untuk memberi ikan hasil tangkapan kepada tetangga. Masing-masing keluarga memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil tangkapan mereka dengan peralatan individual yang dimilikinya masing-masing.

Di Bulutui, dalam perkembangan lebih lanjut, pada tahun 1960-an para nelayan dari suku Bugis mulai memperkenalkan alat tangkap

ikan yang disebut “Bagang”. Alat tangkap ini dibangun di laut seperti membangun panggung dengan menggunakan lampu tempel sebagai pemikat ikan. Sejak Bagang diperkenalkan, kemudian banyak Bagang dibangun di sekitar Dusun Bulutui. Menurut beberapa responden, hingga tahun 1970-an, dari mulai Desa Munte hingga Desa Bahoy terdapat sekitar 100 buah Bagang. Munculnya Bagang ini secara sosial membawa tradisi baru dalam distribusi pangan di kalangan masyarakat Bulutui. Setiap hasil panen ikan dari Bagang dibawa ke pantai, seluruh masyarakat yang berada di pantai diberi beberapa ekor oleh pemilik Bagang. Menurut salah seorang warga Bulutui yang memiliki Bagang, setiap musim panen ikan di Bagang, sebelum ikan dari Bagang sampai di pantai, warga masyarakat, terutama ibu-ibu sudah berkerumun di pinggir pantai untuk mendapat beberapa ekor ikan dari pemilik Bagang.

Seiring dengan berkembangnya Bagang, berkembang pula alat tangkap berupa pukot untuk ikan teri yang disebut “Pajala”. Seperti halnya Bagang, penggunaan Pajala juga secara sosial membawa tradisi baru dalam distribusi pangan di kalangan masyarakat Bulutui, setiap warga yang berada di pinggir pantai, kerabat serta tetangga selalu mendapat bagian dari hasil Pajala. Namun demikian, hasil tangkapan dari Pajala ini sangat terbatas oleh musim, sehingga alat tangkap tersebut tidak dapat digunakan setiap saat.

Jika penggunaan Bagang dan Pajala secara sosial membawa tradisi baru dalam distribusi pangan di kalangan masyarakat Bulutui, penggunaan Pukat Chang dalam 10 tahun terakhir ini selain membawa tradisi dalam distribusi pangan seperti Bagang dan Pajala juga membentuk pola kerja sama baru dalam melaut di kalangan masyarakat Bulutui. Pukat Chang digunakan pada kedalaman 30 meter dan pada dasarnya pukot ini seperti pukot harimau; berbagai jenis ikan dengan berbagai umur dan ukuran yang ada pada kedalaman tersebut dapat ditangkap. Penggunaan Pukat Chang melibatkan banyak orang, minimal 18 hingga 20 orang anak buah kapal (*masanai*), sembilan orang penyelam dan dua hingga empat orang teknisi yang bertugas menjaga kompresor untuk para penyelam. Di tengah-tengah masyarakat yang terbiasa dengan pola kerja individual, pola kerja sama dalam kelompok seperti yang diterapkan dalam penggunaan Pukat Chang merupakan cara kerja baru bagi masyarakat Bulutui. Terlepas

dari pro dan kontra yang muncul di kalangan masyarakat, proses konsolidasi dalam kerja sama kelompok terus berlangsung seiring dengan penggunaan alat chang yang cenderung berpindah-pindah tempat. Para *masanai*, selain mendapat upah dari bagi hasil, juga mendapat bagian ikan untuk di rumah yang disebut “Gosok-gosok”.

Sementara itu, jika Pukat Chang digunakan di sekitar Bulutui, hampir setiap warga masyarakat selalu mendapat bagian dua hingga tiga ekor. Menurut pengakuan beberapa narasumber, pada saat Pukat Chang banyak dioperasikan di wilayah sekitar Bulutui, hampir tidak pernah masyarakat Bulutui membeli ikan untuk kebutuhan konsumsi mereka. Sering terjadi, ikan bagian pemberian dari pemilik Pukat Chang terpaksa dijual karena bosan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli jenis ikan lain. Namun demikian, saat ini hampir seluruh Pukat Chang dioperasikan di daerah lain, terutama di wilayah Ternate. Sejalan dengan itu, saat ini banyak warga masyarakat yang terpaksa harus membeli ikan dari pedagang keliling, meskipun mereka tinggal di pinggir pantai. Dalam perkembangan lebih jauh, seiring dengan kerusakan lingkungan yang terus berlanjut, tingkat kesulitan untuk mendapatkan ikan cenderung terus meningkat. Di tengah kondisi seperti ini, pilihan untuk memulai budidaya jenis ikan yang memiliki daya saing tampaknya menjadi pilihan yang bijak dalam mempertahankan kesinambungan hasil laut.

Sebagaimana halnya di Bulutui, di lingkungan masyarakat Pulau Nain pun distribusi pangan (ikan) terhadap masyarakat terkait dengan perkembangan alat tangkap yang digunakan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat setempat, dahulu seluruh penduduk Pulau Nain hanya menggunakan pancing dan cubi untuk menangkap ikan. Baru sekitar tahun 1940-an digunakan jaring yang dibuat dari serat tanaman bago. Bersamaan dengan itu juga mulai digunakan Sero dari bambu. Dalam perkembangan lebih lanjut, sekitar tahun 1950-an mulai digunakan jaring yang terbuat dari benang untuk ikan antoni. Bersamaan dengan itu juga mulai digunakan Jaring Giop untuk ikan roa. Pada tahun 1960-an mulai berkembang Jaring Chang kecil yang melibatkan 10 hingga 12 orang *masanai*. Kemudian pada tahun 1970-an mulai digunakan Jaring Chang besar yang melibatkan banyak warga masyarakat. Seiring dengan itu juga berkembang pembuatan Bagang

untuk menangkap ikan teri. Distribusi pangan (ikan) kepada masyarakat dimulai sejak adanya jaring yang melibatkan banyak warga masyarakat. Namun demikian, distribusi pangan yang paling tampak pada saat digunakan Jaring Giop dan Jaring Chang baik yang berukuran besar maupun kecil. Dalam penggunaan alat tangkap tersebut dikenal pembagian ikan kepada *masanai* dengan sebutan ikan gosok-gosok, yakni bagian ikan untuk keluarga para *masanai* yang terlibat.

Koperasi: Antara Tuntutan Ideal dan Realitas

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu, para ahli ilmu sosial menyebut koperasi sebagai lembaga yang memiliki fungsi ganda, yakni fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Berbeda dengan badan usaha lainnya, koperasi merupakan kumpulan anggota, bukan kumpulan modal seperti Perseroan Terbatas (PT). Di satu sisi, kerja sama para anggota merupakan fondasi bagi keberadaan sebuah koperasi, di sisi lain tingkat kesejahteraan anggota merupakan tujuan akhir yang harus dicapai oleh lembaga tersebut. Dalam konteks ini, Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan syarat mutlak yang harus diselenggarakan guna menampung aspirasi para anggota. Di samping itu, Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan keuntungan yang diperoleh lembaga tersebut, harus dibagikan kepada para anggota sesuai dengan kontribusinya. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa lembaga tersebut dimiliki oleh para anggota, bukan oleh segelintir pengurus yang menjalankan mekanisme organisasional.

Nilai-nilai ideal dalam kelembagaan koperasi sebagaimana dideskripsikan di atas cenderung sulit diwujudkan dalam realitas. Sebagian besar koperasi dibentuk oleh dan untuk kepentingan elit lokal, sehingga tidak memberikan manfaat nyata kepada para anggotanya. Akibat kondisi ini, koperasi hanya tinggal kerangka organisasional kosong dengan sederet nama pengurus, tapi tanpa aktivitas nyata. Kondisi koperasi seperti ini yang ada di lingkungan masyarakat Bulutui, sehingga sebagian warga masyarakat tidak mengetahui perkembangan koperasi yang ada.

Sementara itu, di Pulau Nain, pembentukan koperasi memiliki catatan panjang dalam sejarah sosial setempat. Menurut salah seorang

responden, dahulu di wilayah Pulau Nain pernah berdiri tiga koperasi, namun sekarang ketiga koperasi tersebut vakum; satu Koperasi Unit Desa (KUD) hanya meninggalkan papan nama dan sisa-sisa gudang serta ruangan bekas kantor, sedangkan koperasi lainnya hanya tinggal nama. Menurut salah seorang tokoh masyarakat setempat, koperasi yang dahulu pernah ada hanya menjadi alat sebagian tokoh masyarakat setempat untuk memperebutkan sumber daya alam yang ada di pulau Nain, sehingga sering terjadi konflik kepentingan, baik di antara para tokoh masyarakat setempat maupun antara tokoh masyarakat setempat dengan pihak luar yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Koperasi Unit Desa di Pulau Nain berdiri sejak tahun 1992. Pendirinya adalah salah seorang warga Pulau Nain yang tinggal di Manado. Koperasi ini pada awalnya bergerak dalam bidang penyediaan alat-alat budidaya rumput laut seperti tambang plastik, simpan pinjam, dan membuka Warung Serba Ada (Waserda). Warga masyarakat yang menjadi anggota KUD sekitar 100 orang, setiap anggota diwajibkan untuk menyimpan simpanan pokok sebesar Rp.25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp.5.000,-.

Dalam perkembangan lebih lanjut, setelah KUD bekerja sama dengan PT. Amarta, milik seorang pengusaha cina dari Surabaya, pada tahun 1997 kemudian koperasi ini mulai menampung hasil budidaya rumput laut dari para anggotanya. Sejak koperasi melaksanakan usaha barunya ini kemudian timbul konflik dengan CV. Sumber Rejeki yang pada saat itu memegang monopoli dalam penampungan hasil budidaya rumput laut dari para penduduk. Pihak CV. Sumber Rejeki menganggap bahwa dirinya merupakan satu-satunya perusahaan yang berhak menampung hasil budidaya rumput laut dari para penduduk, sebab sejak 1994 CV. Sumber Rejeki banyak membina masyarakat dalam budidaya rumput laut. Perusahaan tersebut membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang menjalankan budidaya, kemudian memberi alat-alat produksi seperti tambang plastik dan bibit, bahkan anggota kelompok diberikan uang untuk upah kerja penanaman rumput laut. Dengan berbagai usaha yang telah dilakukannya, perusahaan tersebut merasa memiliki hak penuh untuk menampung hasil budidaya dari masyarakat dengan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan yang bersangkutan.

Di tengah persaingan yang terjadi, KUD berhasil meningkatkan harga beli rumput laut terhadap masyarakat. Jika saat itu CV Sumber Rejeki menampung rumput laut dari masyarakat dengan harga Rp.4.000,-/kg, harga pembelian di KUD sebesar Rp.6.000,-/kg. Dengan tingginya harga pembelian tersebut, maka bukan saja para anggota yang menjual rumput laut kepada KUD, tetapi juga banyak warga lain yang tadinya menjual kepada CV. Sumber Rejeki berpindah ke KUD. Dengan kondisi seperti ini, CV. Sumber Rejeki merasa disaingi dan dirugikan, sehingga konflik dengan pihak KUD pun semakin menajam. Berbagai upaya dilakukan oleh CV. Sumber Rejeki untuk mencegah para penduduk agar tidak menjual rumput laut kepada pihak KUD. Kadang kala pihak perusahaan menggunakan aparat kepolisian dan militer.

Dengan sikap perusahaan seperti itu, kemudian para anggota KUD mengadakan unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Dalam dialog dengan para anggota DPRD, para anggota KUD meminta agar warga masyarakat Pulau Nain bebas menjual rumput laut kepada siapa pun, termasuk kepada pihak KUD. Namun, hal itu mendapat bantahan dari para tokoh masyarakat yang sudah diperalat oleh Pihak CV. Sumber Rejeki. Mereka menyatakan bahwa perusahaan tersebut sudah selayaknya menjadi penampung rumput laut di Pulau Nain, karena sudah membina masyarakat dalam budidaya dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Dengan pecahnya pendapat masyarakat, konflik kepentingan di antara dua kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan di ruang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akhirnya kedua belah pihak tetap menjadi penampung rumput laut dengan persaingan yang kian menajam.

Di tengah situasi seperti ini, pihak perusahaan memperkuat para pengumpul, terutama pengumpul dari kalangan tokoh masyarakat. Mereka diberikan pinjaman modal untuk menampung rumput laut dari penduduk. Seringkali para penduduk diberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pengembaliannya dihitung dari jumlah hasil panen rumput laut yang dimilikinya. Meskipun KUD memiliki ruang gerak yang relatif terbatas, harga belinya relatif lebih tinggi dibandingkan pihak CV. Sumber Rejeki. Oleh karena itu, semakin hari semakin banyak warga di luar anggota yang menjual rumput laut kepadanya. Seiring dengan itu koperasi mendapat

keuntungan yang relatif besar. Dalam waktu yang tidak terlampau lama, KUD berhasil membangun gudang penyimpanan rumput laut serta ruangan kantor yang memadai.

Namun, keberhasilan dalam bidang ekonomi tampaknya tidak disertai dengan pengembangan fungsi sosialnya. Menurut salah seorang mantan pengurusnya, selama koperasi tersebut berdiri hanya sekali menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan. Sementara itu, Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapat tidak pernah dibagikan kepada para anggota, hanya sekali para anggota mendapat pembagian sekarung beras menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam perkembangan lebih lanjut, menurut salah seorang responden, nuansa nepotisme di kalangan pengurus semakin kental. Hanya saudara dan kerabat pengurus yang sering mendapat fasilitas dari koperasi. Pinjaman modal yang seharusnya ditujukan pada seluruh anggota, dalam praktiknya, hanya diberikan kepada saudara atau kerabat dekat para pengurus. Dengan kondisi seperti ini, maka koperasi hanya menguntungkan para pengurusnya, sementara kesejahteraan anggota diabaikan. Sejalan dengan menghilangnya rumput laut karena terkena hama, kegiatan KUD pun menghilang. Saat ini yang tersisa hanya papan nama dan sisa-sisa gudang serta ruangan bekas kantor.

Selain KUD, ada dua koperasi yang didirikan di Pulau Nain, yaitu Koperasi Bunga Nain dan Koperasi Nelayan Gotong Royong. Menurut salah seorang responden, Koperasi Bunga Nain didirikan pada tahun 2004 oleh CV. Sumber Rejeki. Koperasi ini memiliki anggota sebanyak 43 orang. Tujuan pendirian koperasi ini adalah untuk menyaingi KUD yang saat itu berkembang pesat. Koperasi Bunga Nain memiliki usaha menampung rumput laut dari para penduduk, sehingga kegiatannya hampir sama dengan KUD serta warga lain yang jadi penampung.

Selain Koperasi Bunga Nain, pada tahun 1999 beberapa orang tokoh masyarakat setempat mendirikan Koperasi Nelayan Gotong Royong. Menurut salah seorang responden, 20 orang yang menjadi pendiri koperasi tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, baik sebagai saudara, besan ataupun menantu. Menurut salah seorang mantan pengurusnya, koperasi ini memiliki anggota sekitar 200 orang. Kegiatan usaha yang dijalankan meliputi simpan pinjam dan menampung rumput laut dari para penduduk.

Namun, seluruh usaha tersebut hanya berjalan selama lima tahun. Setelah itu vakum. Lebih jauh, responden tersebut menjelaskan bahwa dalam usaha menampung rumput laut, koperasi belum bisa menembus pasar, sehingga akhirnya rumput laut yang telah dibeli dari para penduduk terpaksa harus dijual kepada CV. Sumber rejeki. Sementara itu, pihak CV. Sumber Rejeki tidak pernah membedakan harga beli antara koperasi dengan penampung ataupun warga masyarakat yang menjual langsung kepada perusahaan tersebut. Dengan demikian, maka pihak koperasi tidak bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga, sehingga akhirnya gulung tikar.

Terlepas dari berbagai faktor yang menyebabkan kebangkrutan koperasi, rentetan pendirian berbagai koperasi yang ada menegaskan bahwa lembaga tersebut menjadi instrumen elit lokal dalam memperebutkan sumber daya alam yang ada. Kerja sama para anggota serta prinsip-prinsip koperasi pada umumnya dinafikan demi mengejar keuntungan para pengurusnya. Dengan kondisi seperti itu, tampaknya sulit menciptakan koperasi yang memiliki fungsi ganda yang seimbang antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

Meskipun rentetan peristiwa pembentukan koperasi di masa lalu tidak memiliki nilai signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga sehingga meninggalkan catatan buruk dalam sejarah sosial lokal, tetapi sebagian warga masyarakat, baik di Bulutui maupun di Pulau Nain, masih berharap untuk dibentuk organisasi kemasyarakatan baru. Mayoritas warga di Bulutui dan sebagian warga di Pulau Nain mengharapkan organisasi kemasyarakatan baru tersebut berperan dalam pengolahan hasil tangkapan. Harapan ini tampaknya tidak terlepas dari kondisi empiris yang terjadi dewasa ini. Untuk jenis-jenis ikan tertentu para nelayan pada dasarnya menjadi pemasok pabrik pengolahan ikan yang ada di daerah lain. Dalam konteks ini mereka menyadari bahwa terjadi kesenjangan keuntungan yang sangat jauh antara pemasok dengan pihak pabrik, terlebih-lebih jika jalur pemasarannya melalui pengumpul. Oleh karena itu, mereka mengharapkan adanya teknologi pengolahan hasil tangkapan di luar teknologi tradisional yang telah ada, seperti pengasinan dan pengasapan. Dengan adanya teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari ikan hasil tangkapan mereka.

Selain pengolahan hasil tangkapan, mereka juga mengharapkan organisasi kemasyarakatan baru tersebut berperan dalam memberikan kredit perahu dan alat tangkap. Jika harapan ini dikaitkan dengan penguasaan alat tangkap komunal yang banyak digunakan dewasa ini, tampaknya ada idikasi warga masyarakat untuk memiliki alat tangkap komunal secara kelompok. Selama ini alat tangkap komunal, baik Jaring Chang maupun Jaring Giop beserta perahunya dimiliki oleh pemilik modal (*Ahenar*). Para nelayan hanya berfungsi sebagai anak buah kapal (*masanai*). Selain pembagian hasil yang relatif senjang, para *ahenar* juga menguasai penjualan hasil tangkapan, sehingga sulit bagi *masanai* untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Atas dasar kondisi ini tampaknya responden mengharapkan organisasi kemasyarakatan yang baru berperan dalam memberikan bantuan kredit perahu dan alat tangkapnya untuk dimiliki secara berkelompok di antara mereka.

Selain perahu dan alat tangkap, responden juga mengharapkan agar organisasi kemasyarakatan baru dapat menyediakan pinjaman modal untuk melaut, sebab selama ini pinjaman modal untuk melaut berasal dari *Ahenar*. Jika mereka tidak memperoleh hasil dari melaut, maka hutang mereka akan menumpuk pada *Ahenar* yang terus menerus dipotong dari hasil yang mereka peroleh di kemudian hari. Selain itu, sebagian masyarakat Bulutui mengharapkan agar organisasi kemasyarakatan yang baru berperan dalam menyediakan pinjaman untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan adanya jaminan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga diharapkan memberikan ketenangan hidup di tengah penghasilan sebagai nelayan yang tidak pasti. Di sisi lain adanya jaminan kebutuhan rumah tangga juga dapat mencegah mereka terlilit hutang di tangan rentenir yang cenderung terjadi secara umum di kalangan masyarakat nelayan.

Penutup

Alat tangkap yang digunakan nelayan merupakan produk budaya dari komunitas penggunanya. Dia merefleksikan pola kerja sama, solidaritas serta sikap hidup dari penggunanya. Dilihat dalam prespektif yang luas, penggunaan alat tangkap ini membawa implikasi terhadap kehidupan sosial secara luas. Alat tangkap yang digunakan masyarakat di Bulutui maupun di Pulau Nain pada masa lalu berupa pancing, tombak, panah, ataupun pukat

nyare. Alat tangkap tersebut merupakan alat tangkap yang bersifat individual, bukan alat tangkap yang bersifat komunal. Oleh karena itu, seluruh alat tangkap tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hampir seluruh penduduk memiliki minimal salah satu alat tangkap tersebut, sehingga setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan akan ikan bagi keluarganya. Dengan kondisi seperti ini, pada saat itu tidak ada tradisi untuk memberi ikan hasil tangkapan kepada tetangga; masing-masing keluarga memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil tangkapan mereka dengan peralatan individual yang dimilikinya masing-masing. Setelah berkembang alat tangkap yang bersifat komunal, seperti Bagang, Pajala, Jaring Chang, dan Jaring Giop, kemudian muncul tradisi untuk mendistribusikan ikan pada warga masyarakat lainnya. Lebih jauh, penggunaan Pukat Chang dalam 10 tahun terakhir ini, selain membawa tradisi dalam distribusi pangan seperti Bagang dan Pajala, juga membentuk pola kerja sama baru dalam melaut di kalangan masyarakat Bulutui. Di tengah-tengah masyarakat yang terbiasa dengan pola kerja individual, pola kerja sama dalam kelompok seperti yang diterapkan dalam penggunaan Pukat Chang merupakan cara kerja baru bagi masyarakat Bulutui.

Di atas telah disinggung bahwa penggunaan alat tangkap membawa implikasi terhadap kehidupan sosial secara luas. Penggunaan alat tangkap yang bersifat individual menyebabkan sikap individualisme penduduk relatif tinggi. Keadaan ini berimbas pada kehidupan kemasyarakatan. Solidaritas dan sikap gotong royong di kalangan masyarakat relatif rendah. Untuk mengatasi hal ini, para tokoh masyarakat di Bulutui membentuk pranata sosial yang diberi nama Kerukunan Warga dan Persatuan. Meskipun tidak dibentuk oleh para tokoh masyarakat setempat, Kerukunan Warga dan Persatuan juga muncul di kalangan masyarakat Pulau Nain. Dalam perkembangan lebih lanjut, kedua pranata sosial ini kemudian menjadi wahana untuk mengkodinasi gotong royong dalam membantu masyarakat yang menghadapi hajatan atau dalam kedukaan.

Dalam deskripsi di atas terlihat bahwa nilai gotong royong dan kerja sama merupakan nilai yang relatif baru dikenalkan dalam kehidupan sosial. Internalisasi nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat masih memerlukan proses yang panjang. Di tengah kondisi seperti ini kelembagaan koperasi yang bertumpu pada

kegiatan gotong royong para anggotanya, relatif sulit berhasil, terlebih-lebih jikakeberadaan kelembagaan tersebut tidak memiliki nilai yang signifikan dengan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat secara luas. Atas dasar keadaan ini maka pembentukan kelembagaan baru untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat sebaiknya bertumpu pada kepentingan masyarakat setempat. Berbagai harapan masyarakat tentang fungsi dan peran pranata baru sebaiknya dijadikan acuan untuk melakukan aktivitas di tengah basis komunitas terbawah.

Daftar Pustaka

- Binswanger, Hans P. & Vernon W. Ruttan. (1978). *Induced Innovation: Technology, Institutions and Development*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Colleman, J.C. (1994). *Foundation of Social Theory*. Cambridge and London: Harvard University Press.
- Gillin, John Lewis & John Phillip Lewis. (1954). *Cultural Sociology*. New York: The MacMillan Book Company.
- Hayami, Yujiro & Masao Kikuchi. (1987). *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hebding, Daniel E. & Leonard Glick. (1994). *Introduction to Sociology: A Text with Readings*. Forth Edition. Filipina: McGraw-Hill Inc dan Philipine Graphic Art Inc.
- Horton, Paul B. & Chester L. Hunt. (1984). *Sociology*. Sixth Edition. Sidney dan Tokyo: McGraww-Hill Book Company.
- Huntington, Samuel P. (1965). *Political Development and Politic Decay*. World Politics Journal, Vol. 17 No. 3. Cambridge: Cambridge University Press.
- Johnson, Harry M. (1960). "Sociology: A Systematic Introduction". Under the General Editorship of Robert K. Merton. Harcourt. New York dan Burlingame: Brace and World Inc.
- Koentjaraningrat. (1964). *Pengantar Antropologi*. Cetakan kedua. Jakarta: Universitas Indonesia.

- _____. (1974). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- _____. (1997). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemardjan, Selo & Soelaeman Soemardi. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1999). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Edisi Baru, Cet. 28. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taneko, Soleman. (1993). *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjondronegoro, SMP. (1999). "Memudarnya Otonomi Desa" Dalam: *Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud RI.
- Uphoff, Norman. (1986). *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. Virginia: Kumarian Press.